



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEHUTANAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN
EKOSISTEM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SATYAWAN PUDYATMOKO
2. Jabatan : DIREKTUR JENDERAL
3. NHK : 840723

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp.

3.103.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/150 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, Rp. 1.400.000.000
2. Tanah Seluas 1.899 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 1.337 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
4. Tanah Seluas 323 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 323.000.000
5. Tanah Seluas 905 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 905.000.000
6. Tanah Seluas 1.955 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
7. Tanah Seluas 2.083 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
8. Tanah Seluas 7.150 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

97.000.000

1. MOBIL, TOYOTA YARRIS Tahun 2018, HADIAH Rp. 80.000.000



2. MOTOR, HONDA CBR Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
15.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.
2.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 220.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 385.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.805.000.000

III. HUTANG Rp. 50.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.755.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.